

MODEL PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA SEMARANG

Putri Agus Wijayati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
putrikediri1962@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to discover the empowerment model of traditional market as a place for small-scale entrepreneurs in the city of Semarang. In the first year of using historical research has produced a historical description that the traditional market in the colonial era was able to demonstrate its existence as a place of trade for market participants and was able to compete with the private market. The empowerment model is packaged in the form of labor market discipline, regularity in the market area, the space flexibility for the market visitor and availability of parking spaces for the towing animals. The description of traditional market currently dominated by slums, congested, muddy, narrow access for buyers and vendors stalls are disorganized was derived from field research. If the historical description is combined with the today market description, it will produce a prototype of an effective and strong traditional market so that traditional traders in the city of Semarang have empowerment. Stakeholder participants' model is used as alternative models to empower all the traditional market potential.

Keyword: empowerment, economic community-based, traditional market

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan pasar tradisional sebagai tempat wirausaha skala kecil di Kota Semarang. Pada tahun pertama menggunakan historical research telah menghasilkan deskripsi historis bahwa pasar tradisional era kolonial mampu menunjukkan eksistensinya sebagai tempat perdagangan pelaku pasar dan mampu bersaing dengan pasar swasta. Model pemberdayaan dikemas dalam bentuk disiplin pegawai pasar, ketertiban di dalam lahan pasar, keleluasaan jalan bagi pengunjung pasar, dan ketersediaan lahan "parkir" bagi hewan penarik. Melalui field research, diperoleh deskripsi pasar tradisional saat ini lebih didominasi kumuh, sesak, becek, akses pembeli sempit, dan lapak PKL tidak beraturan. Deskripsi historis dipadukan dengan deskripsi pasar dewasa ini dihasilkan prototype pasar tradisional yang efektif dan kuat agar pedagang pasar tradisional di Kota Semarang memiliki keberdayaan. Model partisipan stakeholder dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar tradisional.

Keyword: pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, pasar tradisional.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan "pasar kotapraja" di Semarang era kolonial tidak semata-mata dari penataan fisik. Namun juga diarahkan pada kedisiplinan pegawai atau pengelola pasar, baik kepala pasar atau siapapun apabila tidak cakap atau melakukan kesalahan dan korupsi akan diberhentikan (*Notulen in de Verga-*

deringen 1913). Berbagai peraturan tentang infrastruktur dan pengelolaan pasar dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Kotapraja Semarang untuk menjaga kebersihan pasar (*Gemeentebled van Semarang Jaargang 1918*).

Refleksi historis memberikan pemahaman dalam pemberdayaan pasar di Semarang, terlepas dari kepentingan politis-ekonomis pihak kolonialis. Pasar

kotapraja yang dikelola pemerintah mampu bersaing dengan "pasar partikelir" yang dimiliki pihak swasta. Pada kondisi saat ini, pasar tradisional di Kota Semarang terlihat kotor, kumuh, tidak beraturan, dan tidak nyaman (*Suara Merdeka*, 11/10/2008). Pemandangan demikian terlihat di Pasar Johar, Pasar Peterongan, Pasar Karangayu, dan beberapa pasar tradisional lainnya. Di samping itu, kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik dan fasilitas umum, pedagang kaki lima tidak tertib, penataan los atau lapak tidak beraturan, serta permasalahan lain yang kompleks.

Pemerintah sebenarnya telah banyak mengeluarkan dana dalam mengurai persoalan yang dihadapi pedagang pasar tradisional. Namun, selama ini renovasi yang menjadi konsep revitalisasi pasar, belumlah merupakan resep mujarab untuk mengobati kondisi perpasaran. Penjelasan yang bisa ditangkap, selama ini penataan dan pengelolaan belum berfungsi secara efektif. Persaingan kapitalis lokal (pasar tradisional) dengan kapitalis global (pasar modern) tidak seimbang, pada gilirannya telah meminggirkan pedagang kecil sebagai wirausahawan mandiri dalam lapisan ekonomi global. Pasar tradisional sebagai muara dari aktivitas wirausahawan skala kecil berada pada tingkatan terbawah dalam strata tersebut menjadi tidak berdaya di tengah gempuran kuasa kapitalis global.

Permasalahan yang melingkupi pasar tradisional telah memunculkan pemikiran untuk kembali melihat prototype pasar tradisional di masa lalu sebagai bahan untuk mendiagnosa kondisi sekarang sehingga mampu dirancang model pemberdayaan pasar tradisional. Untuk itu, perlu dirumuskan permasalahan antara lain: bagaimana pengelolaan pasar tradisional di kota Semarang era kolonial?; bagaimana profil

pasar tradisional di Kota Semarang pada saat ini?; bagaimana prototipe pasar tradisional yang efisien dan kuat untuk mengkomodasi wirausaha skala kecil?

METODE PENELITIAN

Historical research digunakan sebagai upaya rekonstruksi masa lalu manusia tentang segala hal yang sudah dikatakan, dikerjakan, dan dialaminya (Kuntowijoyo, 1999:17; Abdurrahman, 1999:43). Untuk dapat mengetahui bagaimana *Gemeente* Semarang mengelola pasar tradisional, dipinjam prosedur penelitian sejarah (Garraghan, 1957:33-34; Gottschalk, 1975).

Peneliti sejarah bukan saksi mata dari kenyataan yang ingin diketahui, karena itu tidak empiris (Collingwoog, 1985:354), sehingga pengumpulan data pemberdayaan pasar era kolonial bertumpu pada sumber tekstual, melalui teknik "observasi tidak langsung" pada data verbal yang terekam (Kartodirdjo, 1982:98). Pengumpulan data dilaksanakan sejak Juli Agustus 2011 di ANRI Jakarta diperoleh *Regeering Besluiten* 15 Juli 1873 No. 37, *Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1906 No. 128; 1908 No.183, 1914 No. 379 dan 380 terkait re-gulasi pasar serta *Mailrapport* 23 Agustus 1913 No. 1011/45. Adapun di PNRI diperoleh: *Gemeentebled uitgegeven voor der Gemeente Semarang* dari tahun 1913-1930; *Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang* tahun 1913-1935; dan *Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over het jaar 1912-1919*. Untuk mengusut hubungan intrinsik antar fakta tidak sekedar pendekatan kualitatif deskriptif, namun juga akan menggunakan analisis fakta interpretatif dan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif. Fakta yang saling

berkaitan, perlu mendapatkan perhatian untuk ditafsirkan. Pendekatan kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan dari berbagai data tentang pasar tradisional di Kota Semarang yang ditemukan (Barney, 1994:17-20). Apabila fakta dalam sejarah sebagai kerangka, maka daging, otot, darah, ruh serta jiwanya adalah penafsiran terhadap fakta (Ali, 1961:22-23).

Sementara pengumpulan data dalam *field research* menggunakan teknik observasi dan wawancara (Vredendregt, 1983:72-98), untuk memperoleh deskripsi pasar tradisional di Kota Semarang pada saat ini. Metode observasi untuk melihat realitas langsung perilaku dan sikap pedagang pasar dan disiplin pelaku usaha pasar. Peneliti terpisah dari kegiatan yang diobservasi karena hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi atau menyaksikan kegiatan jual beli warga pasar. Peneliti juga mengkaji subyek yang tidak mampu memberikan informasi verbal sehingga perilaku yang diamati akan lebih sah. Kegiatan pengumpulan data melalui observasi dapat telaksana dengan baik dan lancar. Pengambilan gambar dilakukan di Pasar Johar, Bulu, Peterongan, Karangayu, Jatingaleh, Banyumanik, dan Pasar Sronдол sejak Juni-September 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pasar di Semarang Era Kolonial

Sejarawan terkemuka, Taufik Abdullah pernah mengatakan bahwa Bangsa Indonesia bukan hanya kurang mengarifi sejarah, namun juga masih memelihara dendam sejarah (*Kompas*, 6/8/2005). Sejarah memang tidak memberikan solusi, tetapi memberikan bahan untuk mendapatkan kearifan. Ada ke-

cenderungan stigma kolonial hendak dilupakan atau dianggap tidak sesuai lagi dengan atmosfer kemerdekaan. Terbentuknya *Gemeente* Semarang melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1906, membawa konsekuensi pemerintah Kotapraja Semarang memperoleh kewenangan untuk mengurus segala sesuatu, termasuk pasar.

Pemberdayaan pasar direalisasikan mulai dari bangunan dan sistem manajemen. Usul Komisi Pasar tentang pendirian pasar "sentral" di Bugangan, telah menunjukkan bahwa aspek zonasi menjadi pertimbangan utama. Karena itu Komisi Pasar memutuskan membangun los-los pasar sementara di Bugangan untuk pembangunan "pasar lokal", bukan "pasar sentral". Pertimbangannya adalah pasar sentral, tentunya didirikan di pusat kota. Padahal di pusat kota sudah ada Pasar Pedamaran yang sangat ramai (Wijayati, 2009).

Dalam *Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (hal:407), dijelaskan bahwa pasar oleh P.J. Veth disebut *bazar* yang berasal dari kata Persia. Orang Belanda menyebutnya *passer*, terkadang juga *markt*. Dalam bahasa Jawa disebut *peken* yang juga bisa diartikan bahwa dalam seminggu, pasar di Jawa ada 5 hari, terdiri: legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Clifford Geertz dalam *Penjaja dan Raja* (1977:34) menyebutkan, mekanisme ekonomi yang paling menonjol adalah sistem harga luncur (*sliding price system*) yang disertai tawar menawar untuk sampai pada kesepakatan harga. Tawar menawar itu hanyalah sebuah refleksi dari realitas bahwa tidak adanya pembukuan yang rinci dan kompleks. Namun demikian, eksistensinya sangatlah penting sebagai tempat untuk menggantungkan keberlangsungan ekonomi rakyat, namun realitasnya, semakin menurun sejalan dengan ekspansi retail modern, terutama setelah krisis ekonomi 1998 (*Seputar*

Indonesia. 16/3/2008). Pasar tradisional merupakan hilir pemberdayaan ekonomi rakyat, karena semua produksi rakyat dijual dan sekaligus sebagai tempat masyarakat umum memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengelolaan tidak sebatas fisik, ketika pimpinan tidak mampu menjalankan tugas, akan mengajukan pengunduran diri. Seperti terekam dalam catatan rapat dewan bahwa, Reksohardjo atas permohonannya diberhentikan dengan hormat sebagai kepala pasar (*Notulen van het Verhandeligen in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1913*: 13-14). Tanggal 28 Maret 1913, Sastromoeljo mengajukan permohonan diberhentikan sebagai kepala pasar (*Notulen 1913*:172) disusul 6 November 1915 Raden Chosin diberhentikan tanpa hormat dari jabatan pembantu kepala pasar klas-2 (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over het jaar 1915*:15). Tiga peristiwa pemberhentian itu bisa dijadikan indikasi bahwa kedisiplinan perlu ditegakkan dalam manajemen pasar. Apabila terdapat pelanggaran yang telah dilakukan pengelola pasar atau tidak mampu mengelola pasar, tindakan pengunduran diri akan menjadi hal yang biasa pada era kolonial.

Pengelolaan sehari-hari usaha pasar diserahkan kepada Komisi Pasar yang dibentuk dewan. Komisi terdiri 3 orang, yaitu C.F. Engelhart sebagai ketua, H.H. de Cock dan J. Gerritsen sebagai anggota (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1915*:249). Pada tahun 1915 anggota Komisi Pasar ditambah seorang pribumi, Soedjono yang diangkat dewan. Pengawasan terhadap pasar kotapraja berdasarkan keputusan dewan tanggal 28 Desember 1917 diserahkan kepada dokter hewan kotapraja (*Gemeentebblad der Gemeente Semarang jaargang 1918*). Sejak dikeluarkan keputusan itu, Komisi Pasar yang

mengawasi dan mengelola sehari-hari usaha pasar dibebaskan dari tugasnya. Akibat keputusan ini berimplikasi pada peraturan yang ada tentang lembaga pasar juga memerlukan perubahan. Pengawasan langsung atas pasar dilakukan oleh 10 orang kepala pasar dan 13 orang kepala pasar pembantu di bawah pengawasan administratur dan kontrolir pasar.

Diperlukan penambahan jumlah pegawai, namun jumlah kepala pasar tetap 13 orang, hanya jumlah pembantu kepala pasar yang ditambah dari yang semula 14 menjadi 20 orang (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1919*). Jam kerja kepala pasar dan pembantu kepala pasar diatur demikian, karena pada jam-jam tersebut aktivitas pasar paling ramai sehingga membutuhkan pengawasan atas pasar. Diputuskan pula mengenai penghapusan jabatan kontrolir kepala dan kontrolir pasar pada tahun 1919. Daftar formasi diganti jabatan baru, yaitu kontrolir klas-1 berjumlah 3 orang dengan menerima gaji bulanan antara f 125 sampai f 250. Kontrolir klas-2 diberi gaji antara f 75 sampai f 175. Januari 1921, W. Ludwig, yang sebelumnya bekerja pada dinas perumahan diangkat oleh Walikota Semarang, D. De Iongh sebagai pengawas usaha pasar (*Gemeentebblad der Gemeente Semarang over het jaar 1921*:526).

Kepala pasar harus memperhatikan pemungutan retribusi untuk parkir dan tempat penjualan. Kepala pasar harus memperhatikan bahwa, tidak seorangpun menggunakan tempat berjualan selain yang menjadi haknya (*Gemeentebblad der Gemeente Semarang jaargang 1918*). Kepala pasar juga harus mengawasi situasi di pasar agar tidak ada orang yang menderita luka-luka berbahaya memasuki lahan pasar. Selain itu, memperhatikan juga agar jalan masuk dan jalan penghubung di pasar tidak ada barang dagangan yang dijual,

aktivitas berjualan, atau usaha dagang yang dilakukan, serta lalu-lintas di jalan penghubung ini tidak boleh dihambat dengan berbagai cara. Ternyata tugas dan tanggung jawab kepala pasar, meliputi pula pengawasan terhadap kendaraan apapun agar tidak masuk ke dalam lahan pasar. Waktu kerja seorang kepala pasar tidak lebih dari 11 jam (*Gemeentebblad der Gemeente Semarang jaargang* 1919). Hari minggu maupun hari libur tidak terkecuali, hari libur kepala pasar diberikan sekali dalam waktu 11 hari.

Mohamad Kasan, seorang anggota Perserikatan Pendjoewal Pasar Hindia menyampaikan keberatan terhadap kenaikan retribusi yang dibebankan di tempat penjualan Pasar Johar dan Pasar Pedamaran Lor (*Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1922:1142*). Akibat kenaikan tarip, sebagian pedagang meninggalkan pasar. Sementara itu, penerimaan pasar dengan perkecualian Pasar Johar dan Pekojan, mengalami peningkatan selama tahun 1922. Kondisi tersebut dikarenakan penerapan metode pengawasan yang baru atas penerimaan pasar sehari-hari. Sementara menurunnya hasil di Pasar Johar dan Pasar Pekojan diduga bahwa para penjual pakaian pergi berjualan di alun-alun dan sebagian tinggal di beranda rumah-rumah orang Cina di Pasar Kranggan dan Petudungan (*Gemeentebblad uitgave voor rekening der Stadsgemeente Semarang, 1923*).

Terdapat dua jenis pasar partikelir di Kotapraja Semarang, yaitu pasar partikelir yang dibangun pada lahan/tanah partikelir dan pasar partikelir yang berada/didirikan pada tanah pemerintah. Sampai pada tanggal 1 Januari 1916 terdapat 5 pasar partikelir yang didirikan di lahan partikelir, yaitu: Pasar Bulu, Pasar Kampung Melayu, Pasar Ngilir, Pasar Candi, Pasar Ta-

manwinangun. Di samping itu terdapat 3 pasar partikelir di tanah pemerintah, yaitu: Pasar Regang, Pasar Pekojan, Pasar Johar.

Rencana yang dipertimbangkan Komisi Pasar sejak tahun 1912 untuk mengelola pasar partikelir Johar (yang didirikan di tanah pemerintah) oleh Kotapraja Semarang masih belum ada kesepakatan mengenai penebusan beberapa stan di Pasar Johar, sehingga pengeloannya tetap berada di pihak partikelir. Kondisi itu menyebabkan Komisi Pasar tahun 1915 mempertimbangkan bahwa pengelolaan kotapraja juga akan mencakup pasar-pasar partikelir yang didirikan di tanah pemerintah. Dalam surat tanggal 25 Agustus 1915, Komisi Pasar mengusulkan kepada dewan lokal untuk mengubah peraturan pasar. Artinya, ada kemungkinan untuk melakukan pengelolaan oleh kotapraja atas pasar-pasar partikelir.

Rata-rata terdapat 41 orang petugas yang bekerja untuk kebersihan pasar di Kotapraja Semarang. Seperti yang terbagi berikut ini, Pasar Pedamaran Lor: 9 orang, Pasar Pedamaran Tengah: 4 orang, Pasar Pedamaran Kidul: 5 orang, Pasar Kranggan: 4 orang, Pasar Jurnatan: 5 orang, Pasar Pekojan: 1 orang, Pasar Karang Bidara: 2 orang, Pasar Bugangan: 6 orang, Pasar Peterongan: 4 orang, dan Pasar Kintelan: 1 orang. Pembagian jumlah pekerja ini terbukti tidak tepat, karena jumlah pekerja di Pasar Bugangan terlalu sedikit sementara Pasar Pedamaran Lor cukup ditangani 7 orang petugas kebersihan.

Jumlah pasar di Semarang tahun 1918 mencapai 12. Dalam jumlah ini masih terdapat 2 pasar partikelir (Bulu/Traverduli dan Candi), sementara pasar lain menjadi milik kotapraja (Bugangan, Peterongan, Pekojan, dan Kintelan) atau oleh kotapraja diambil alih penge-

lolaannya dari pemerintah (Pedamaran Lor, Pedamaran Tengah, Pedamaran Kidul, Kranggan, Journatan, dan Karangbidara). Pasar Johar tahun 1918 menjadi satu-satunya pasar partikelir yang dibangun di tanah pemerintah, yang belum diambil alih oleh kotapraja, tetapi oleh kotapraja dipungut retribusi dari pemilik pasar atas penggunaan tanahnya. Pasar partikelir biasanya tidak bersifat *filantropis*, melainkan lebih untuk memperoleh keuntungan semata. Aspek kebersihan dan kesehatan pada pasar partikelir tidak begitu diperhatikan oleh pengelolanya. Alasan inilah yang digunakan Kotapraja Semarang untuk mengusahakan pengambilalihan pengelolaan pasar partikelir.

Pasar Bulu dan Candi yang menjadi milik partikelir tidak memenuhi standar minimal aspek kesehatan (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1918:281*). Sehubungan dengan mewabahnya penyakit menular (pes) di kampung yang berbatasan dengan Pasar Bulu, melalui dinas pemberantasan penyakit maka pasar ini mendapat perhatian. Perlunya pembangunan pasar baru di lingkungan kawasan itu, perhatian ditujukan pada lahan di Karangasem, di kompleks Banjir Kanal barat. Namun prioritas diberikan pada lahan rumah komandan militer setempat, terutama letaknya yang lebih strategis dekat pasar.

Aspek kedisipinan merupakan hal yang perlu diperhatikan, terlihat pada saat seseorang akan mendirikan kedai sudah ditertibkan dan dibahas di tingkat dewan kota. Sebagai contoh dalam proses permohonan ijin Mualim yang tinggal di Pekojan untuk mendirikan warung di depan Pasar Johar. Dewan kota dalam mengambil keputusan juga mendasarkan pada masukan dari Komisi Pasar tanggal 3 April 1913 №.31a. Sie Jan Han, seorang warga Tionghoa yang tinggal di Plampitan Kranggan

mengajukan permohonan ijin membuka warung di belakang Taman Kota di samping restoran Oewa. Untuk menanggapi permohonan itu, diadakan pembahasan antara Komisi Pasar, Direktur Proyek Kota dan Ketua Dewan Kotapraja. Didasarkan atas nasehat Komisi Pasar tanggal 28 November 1912 №. 95a, Direktur Proyek Kota tanggal 3 Januari 1913 №. 6/11 dan Ketua Dewan Kotapraja Semarang tanggal 6 Januari 1913 №. 36, maka diputuskan bahwa permohonan Sie Jan Han tidak bisa dikabulkan (*Notulen van het Verhandeligen in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1913:81*). Demikian pula dalam kasus Sadeli, penduduk yang tinggal di Kauman mengajukan permohonan ijin untuk memasang atap di depan rumahnya yang akan digunakan untuk menjual makanan tradisional. Permohonan tersebut diputuskan oleh dewan dengan memperhatikan beberapa masukan dari Komisi Pasar tanggal 9 Juni 1913 №.44a, Direktur Proyek Kota tanggal 8 Mei 1913 №.152/11 dan Ketua Dewan Kotapraja tanggal 16 Juni 1913 №.133 (1913:90). Hasil pembahasan disampaikan kepada kedua pemohon tersebut bahwa Pasar Pedamaran Lor yang terletak tidak jauh dari tempat yang dihuninya, masih menyediakan lahan yang memadai untuk penjualan.

Profil Pasar Tradisional di Kota Semarang Dewasa Ini

Pasar-pasar tradisional di Kota Semarang berada di bawah pengelolaan Dinas Pasar Kota. Pasar Johar merupakan pasar terbesar dan termodern pada sekitar tahun 1930-an di Asia Tenggara. Dari segi struktur, dikatakan modern karena secara struktural, bangunan yang dirancang Thomas Karsten dengan kedalaman konsep pembauran sosial

serta kohesivitas warga kota melalui entitas yang meruang (*Kompas*. 27/1/2007). Dalam *Suara Merdeka* dinyatakan bahwa, persoalan yang membelit Pasar Johar antara lain: tata ruang kacau, lalu lintas semrawut, jaringan listrik rentan kebakaran, keterbatasan lahan parkir (3/1/2009).

Kondisi dewasa ini, pedagang kaki lima tumpah ruah di luar bangunan, di sepanjang trotoar yang semestinya digunakan bagi pejalan kaki dipenuhi pedagang buku, bahkan hingga ke jalan raya, menambah keruwetan suasana pasar dan menghambat lalu lintas di luar pasar. Dampak yang barangkali tidak disadari oleh para pedagang di Pasar Johar adalah, perubahan perilaku masyarakat yang semakin sadar akan kenyamanan menjadi salah satu penyebab Pasar Johar tidak menarik untuk dijadikan pilihan berbelanja.

Hasil observasi pada 5 Juni 2011 diperoleh gambaran kondisi faktual Pasar Peterongan. Lahan parkir yang tidak representatif di pasar ini, menjadi penyebab sering macetnya lalu lintas sepanjang jalan. Kondisi parkir justru lebih parah, badan jalan di sepanjang jalan raya yang banyak dilalui kendaraan umum dan pribadi digunakan untuk parkir kendaraan roda dua. Slogan pada sisi depan Pasar Peterongan "Pasare Resik, Rejekine Apik", tampaknya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebersihan dan pendapatan pedagang. Tidak mampu memberikan stimulus untuk membenahi kondisi internal pasar, hanya sebatas tulisan tanpa makna.

Demikian halnya emperan toko yang seyogyanya diperuntukkan pejalan kaki/pembeli, digunakan untuk menggelar dasaran/dagangan oleh pedagang kaki lima/pekerja informal. Akses jalan bagi pembeli menjadi sempit dengan lebar kurang lebih sekitar setengah meter, bahkan untuk berjalan

saja terkadang harus berimpitan dengan lapak dagangan atau dengan sesama pengunjung pasar. Penataan dan pengelolaan yang tidak tertib, semakin memperparah kekumuhan sebagai pasar rakyat. Guna meningkatkan daya saing pedagang, sudah saatnya perlu perubahan pola perilaku warga pasar akan konsep kenyamanan dan kebersihan.

Kondisi menyedihkan terlihat pada Pasar Banyumanik dan Srandol. Sepinya aktivitas jual beli di pasar ini sudah terlihat dari luar. Baliho yang terpasang berbunyi "Pasare Resik Rejekine Apik", memang resik dalam arti bersih dari pembeli/pengunjung. Namun tentu saja rejeki atau pendapatan pedagang di Pasar Banyumanik mustahil bisa "apik" (bagus, meningkat). Salimah (58 tahun), pedagang yang memiliki kios sejak tahun 1979 di Pasar Banyumanik menuturkan, bahwa sepinya pembeli di pasar ini sangat berpengaruh terhadap pendapatannya. Padahal, Salimah harus membayar retribusi bulanan sebesar Rp 160.000 untuk 1 kios.

Sekitar 10 pedagang di Pasar Banyumanik yang masih mencoba bertahan dengan barang dagangan sayuran, ikan laut yang banyak dihindangi lalat dan pedagang kebutuhan pokok di kios permanen yang sepertinya menunggu waktu kapan nasibnya berhenti berjalan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung sangat buruk, seperti toilet sangat kurang perawatan. Ketika peneliti, Suparti berkisah, bahwa dua deret kios di sebelah kanan dan beberapa dasaran di depannya sudah ditinggalkan pemiliknya/penjual, karena kehabisan modal berdagang dan terlilit hutang yang tidak bisa dilunasi. Sebagai pelaku ekonomi skala kecil, Suparti hanya mampu untuk bertahan entah sampai kapan. Petugas kamtib Dinas Pasar Kota Semarang mengatakan bah-

wa, sekalipun tugasnya sebagai kamtib, Sukardi juga menyapu lahan pasar agar terlihat bersih. Namun perilaku pedagang yang sering membuang sampah sembarangan sulit diubah menambah kesan kotor dan tidak terawatnya pasar yang sudah banyak ditinggalkan para pedagang karena merugi.

Salah satu pasar tradisional di Kota Semarang yang tidak masuk dalam daftar rencana revialisasi tahun 2011, di antaranya adalah Pasar Jatingaleh. Struktur bangunan pasar yang diracancang Thomas Karsten dan kemudian diadopsi untuk membangun Pasar Johar, masih memperlihatkan kondisi sedikit lebih tertata dan terawat, sekalipun keadaan kantor wilayah dinas pasar sendiri memprihatinkan. Seperti layaknya suasana pasar tradisional pada umumnya, di sisi lain dari Pasar Jatingaleh juga ditemukan kesan kumuh, terutama los pedagang sayuran yang berada di balik pedagang ikan, ayam, dan daging. Lorong jalan digunakan untuk berjualan dengan lapak terkesan sederhana, sehingga kekumuhan melekat juga pada pasar ini. Padahal, di dalam Pasar Jatingaleh bisa dijadikan arena wisata kuliner yang tidak kalah bila bersaing dengan resto modern. Suatu keadaan yang sebenarnya mempunyai kelebihan dalam hal kuliner, yaitu adanya warung penjual sop buntut dengan citra rasa bisa diandalkan. Warung-warung demikian jika ditata dan dikelola dengan manajemen profesional dan penyajian yang bersih, bisa dipastikan pendapatan pedagang makanan matang di pasar tradisional Jatingaleh dapat lebih ditingkatkan lagi.

Prototipe Pasar Tradisional Efektif dan Kuat

Konsep pemberdayaan tidak sebatas melakukan renovasi atau pem-

angunan fisik semata guna meremajakan bangunan pasar. Banyak elemen yang perlu digerakkan untuk meretas harapan agar sampai pada muara: pasar nyaman, bersih, aman, kuat, dan efektif sebagai lahan wirausaha skala kecil. Di samping itu, keberadaan dan keberlangsungan pasar sangat tergantung dari perlindungan pemerintah daerah dan perilaku komunitas pasar (pengelola pasar, pedagang, pembeli, petugas kebersihan, petugas parkir). Hal ini turut menentukan keberlangsungan usaha pasar dalam meningkatkan kondisi internal yang dimiliki, sehingga mampu berhadapan dengan kondisi eksternal yang lebih bersifat kompetitif.

Signifikansi pemberdayaan pasar tradisional di Kota Semarang adalah bagaimana mampu mengakomodasi wirausaha skala kecil dan menengah yang menggantungkan hidup di pasar tersebut. Persoalannya, bagaimana prototipe atau model pemberdayaan pasar tradisional yang efektif dan kuat agar mampu menarik minat masyarakat/pengunjung untuk berbelanja, sehingga pedagang kecil dapat ikut menikmati keuntungan dari kondisi ideal perpasarannya tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu memberdayakan peran pasar tradisional, baik secara fisik maupun non fisik. Pembenahan fisik memang sudah mulai dilakukan, seperti pembangunan Pasar Sampangan yang sudah hampir selesai proses pembangunannya dan beberapa pasar lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan.

Penataan sarana dan prasarana sekaligus pembinaan bagi para pedagang hampir tidak disentuh. Kurangnya pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk penguatan pedagang pasar masih dirasa belum terjamah. Sementara itu, model pemberdayaan pasar tradisional berbasis pendekatan

historis juga belum pernah dilakukan. Deskripsi historis dipadukan dengan deskripsi pasar dewasa ini akan dihasilkan *prototype* pasar tradisional yang efektif dan kuat agar pedagang pasar tradisional di Kota Semarang memiliki keberdayaan. Model partisipan *stakeholder* dapat dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar tradisional. *Stakeholder* disini adalah tiga pilar penyangga pasar tradisional yaitu pemerintah, pedagang dan para mitra kerja (*out sourcing*). Masing-masing *stakeholder* mempunyai wewenang dan peran yang tidak kecil dalam memberdayakan pasar tradisional. Peranan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pasar dapat diselaraskan dan disinergikan, sehingga bermanfaat bagi para pelaku usaha di pasar tradisional.

Pasar tradisional sebagai tempat melakukan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, mestinya merupakan tempat yang nyaman bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. *Prototype* pasar tradisional efisien dan kuat diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan semua potensi pasar tradisional. Model Partisipan *Stakeholder* adalah memberdayakan para pihak pemangku kepentingan dalam mengelola sebuah pasar tradisional yang terdiri 3 pilar.

Pertama, pemerintah. Pasar sebagai sebuah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli akan mengakibatkan terjadinya sebuah transaksi ekonomi, meskipun dalam takaran yang sangat minim. Keberadaan sebuah pasar akan menjadi magnet bagi masyarakat sekitar pasar untuk terlibat di dalamnya. Sebuah pasar tradisional biasanya berada di lokasi yang permanen dan sebagian besar yang diperjualbelikan adalah keperluan dasar sehari-hari. Praktek perdagangannya sederhana dan ada interaksi langsung antara penjual dan

pembeli, melalui tawar menawar harga barang.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan sebuah pasar. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui dinas pengelolaan pasar bertugas mengatur dan mengelola semua aset sebuah pasar. Pengelola pasar hendaklah dapat membuat kebijakan yang memikirkan kepentingan pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu perlu juga ditumbuhkan wawasan dan visi para pengelola pasar. Wawasan dan visi pengelolaan pasar sangat diperlukan sebagai antisipasi menghadapi persaingan global yang ditandai dengan hadirnya pasar-pasar modern.

Pengelola pasar haruslah sudah mempunyai cetak biru atau *blue print* atau sebagai lay out pengaturan tata letak pasar dan pengaturan los pasar bagi para penjual. Kebijakan dan peraturan pengelolaan pasar hendaklah dapat dengan tegas ditegakkan sebagai sebuah penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Dalam cetak biru sebuah pasar, sebagai dokumen perencanaan, di dalamnya telah diatur sistem zoning berdasarkan komoditi dan kriteria barang yang akan dijual. Sistem zoning ini akan mempermudah konsumen dalam menemukan jenis barang yang diperlukannya. Selain itu sistem ini juga akan mengatur dengan memisahkan barang komoditi basah dan kering. Papan penunjuk arah zoning merupakan panduan bagi pengunjung pasar supaya dapat dengan cepat menuju penjualan barang yang diperlukannya.

Pengaturan distribusi pedagang diperlukan, supaya pedagang dapat merata menempati los-los pasar, tidak hanya menumpuk di satu lokasi saja. Tempat penampungan sampah dibuat supaya dapat memuat sampah-sampah pasar sebagai akibat aktivitas perpasarannya. Akses pengunjung pasar dibuat

terpisah dengan fasilitasi bongkat muat barang komoditi pasar.

Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi pengaturan izin berdirinya pasar modern, sehingga tidak mematikan keberadaan pasar tradisional. Kantor dinas pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar. Selain itu perlu diadakan pelatihan dan pembekalan bagi pedagang pasar mengenai manajemen dan teknik perdagangan. Program bantuan kredit bagi pedagang kecil perlu dilakukan melalui program kemitraan UKM baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya.

Kedua, pedagang. Pedagang bisa memahami seluk beluk seni berdagang dan menata barang dagangan yang memudahkan pembeli pada saat membutuhkan. Standar mutu barang yang diperdagangkan sudah selayaknya dapat dipenuhi oleh pedagang. Pemasok barang dagangan hendaklah dapat memastikan harga pokok barang dagangan. Hal ini untuk memastikan penjual dapat menetapkan harga barangnya, sehingga pembeli tidak merasa dipermainkan. Penataan barang dagangan dapat diatur dengan *apik* dan dijaga kebersihannya, sehingga mempunyai daya tertarik. Pedagang dalam melayani pembeli bersikap ramah dan familiar, sehingga pembeli akan merasa senang. Pedagang sering belum mengetahui peraturan perlindungan konsumen, sering berbuat curang yang merugikan pembeli.

Aspek menjaga kebersihan lingkungan pasar tradisional, harus disadari pula oleh para pedagang. Tugas dan tanggung jawab memelihara kebersihan dan kenyamanan pengunjung tidak hanya di pundak petugas kebersihan, namun juga para pedagang terlibat aktif berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan pasar.

Ketiga, kemitraan. Kemitraan di-

perlukan oleh para stakeholder pasar guna memberdayakan semua potensi pasar. Kemitraan yang dijalin adalah dengan melibatkan *outsourcing*, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fasilitatif dapat dialih dayakan. Pekerjaan-pekerjaan itu diantaranya adalah pengaturan parkir kendaraan, keamanan di lingkungan pasar, kebersihan pasar, pemeliharaan gedung/bangunan pasar, pelatihan manajemen, dan teknik berdagang.

Adanya alih daya pekerjaan fasilitatif, pihak pengelola pasar dapat lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan substansinya. Dinas pengelola pasar akan dapat lebih fokus merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program kerja agar mampu mewujudkan kondisi perpasaran yang tangguh, efisien, dan kuat di Kota Semarang. Distribusi peran dan tanggung jawab yang tegas ditujukan untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan potensi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat kecil.

Melalui upaya sosialisasi, pembimbingan, dan pendampingan, diharapkan para pedagang tradisional di Kota Semarang mampu memahami permasalahan yang membelenggunya. Persoalan *skill* berdagang atau seluk beluk yang berhubungan dengan factor kepuasan konsumen/pembeli harus sudah tertanam dalam hal ini. Prinsip "pelayanan pembeli adalah raja" sudah selayaknya mulai dipahami oleh pedagang pasar tradisional.

Oleh karenanya, tiga pilar utama seperti dibahas pada uraian di atas menjadi kunci pemberdayaan pasar tradisional sebagai tempat wirausaha skala kecil berbasis ekonomi kerakyatan bisa diujiobakan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan kuat. Melalui deskripsi historis pada sub bab di atas yang kemudian bisa dijadikan sebagai refleksi historis untuk

Tabel 1. Model Partisipan *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	Aspek	Peran
Pemerintah	Kebijakan Peraturan Infrastruktur Hukum	Membuat kebijakan yang berpihak Menerbitkan peraturan pendukung Membangun infrastruktur Menegakkan hukum
Pedagang	Perilaku Mutu Barang Penataan Barang Perlindungan konsumen	Membekali ketrampilan layanan Menjaga mutu barang Menata dagangan dengan rapi Memahami peraturan dan perlindungan konsumen
Kemitraan (<i>outsourcing</i>)	Parkir Kendaraan Kebersihan Pemeliharaan Keamanan	Mengelola lahan parkir Menjaga kebersihan lingkungan Merawat bangunan pasar Menjaga keamanan lingkungan

dijadikan bahan pertimbangan bagaimana mengelola dan menata pasar pada saat ini. Sebuah model pengembangan pasar tradisional kami tawarkan sebagai prototype pemberdayaan pasar yang ideal dengan konsep “model partisipan *stakeholder*”, sebagaimana tertuang pada tabel 1.

SIMPULAN

Pasar-pasar tradisional di Kota Semarang yang dibangun sejak abad XX dikonsep dengan mempertimbangkan fungsi ekonomi dan fungsi sosial sebagai ruang publik. Pembangunan pasar-pasar sudah mampu merepresentasikan penghormatan terhadap pasar sebagai pusat kehidupan masyarakat. Terlepas latar belakang politis-ekonomis yang menjadi landasan pemikiran kepentingan kolonialis, namun konsep pengelolaan yang diterapkan menunjukkan pemikiran yang komprehensif tentang manusia, ruang, lingkungan, dan waktu. Kawasan pasar diatur supaya tetap tertib, bersih, dan rapi, kawasan pasar yang dianggap sudah terlalu padat dipertimbangkan untuk mencari

lahan baru. Penataan kawasan pasar di Semarang merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, apalagi sejak Semarang memperoleh kewenangan desentralisasi. Regulasi pasar disusun untuk mewujudkan kondisi pasar memiliki infrastruktur yang memadai, penataan mata dagangan dengan pertimbangan zonasi. Penerapan regulasi dilaksanakan secara tegas dan disiplin.

Refleksi historis dimodifikasi dengan analisis pasar dewasa ini telah dihasilkan prototype pasar tradisional yang efektif dan kuat. Sebuah prototipe yang dapat dijadikan alternatif guna memberdayakan semua potensi pasar tradisional, kami beri nama “Model Partisipan *Stakeholder*”. Tiga pilar penyangga pasar tradisional yaitu pemerintah, pedagang dan para mitra kerja. Masing-masing *stakeholder* mempunyai wewenang dan peran yang tidak kecil dalam memberdayakan pasar tradisional. Peranan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pasar dapat diselaraskan dan disinergikan, sehingga bermanfaat bagi para pelaku usaha di pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos.
- Ali, Mohamad. 1961. *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia*. Jakarta, Bhratara.
- Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch Indie
- Collingwood, R.G. 1980. *Ide Sejarah*. Terjemahan Muhd. Yusof Ibrahim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia. Cet. Pertama.
- Gemeentebblad der Gemeente Semarang Jaargang 1918
- Gemeentebblad der Gemeente Semarang, 1919
- Gemeentebblad der Gemeente Semarang over het jaar 1921
- Gemeentebblad uitgave voor Rekening der Stadsgemeente Semarang, 1923
- Garraghan, Gilbert S.J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Geertz, Clifford. 1977. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Terjemahan. S. Supomo. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Kompas*, 6 Agustus 2005
- Kompas*, Sabtu. 27 Januari 2007. Adi Himawan. "Masa Depan Pasar Gede Solo"
- Kuntowijoyo, 1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang.
- Mailrapport* 23 Agustus 1913 No. 1011/45.
- Notulen van het Verhandelingen in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1913
- Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1922
- Regeering Besluiten* 15 Juli 1873 No. 37
- Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1906 No. 128; 1908 No.183, 1914 No. 379 dan 380
- Suara Merdeka*, 3 Januari 2009
- Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over het jaar 1915
- Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over het jaar 1918
- Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over het jaar 1919
- Vredenburg, Jacob, 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Wijayati, Putri Agus. 2009. "Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun 1873-1914 di Kota Semarang". *Laporan Penelitian*. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang.